

Beberapa Catatan TENTANG DASAR-DASAR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA Kajian Filosofis Pancasila

Oleh: KMA M. Usop

NILAI-NILAI DASAR

Bila kita menganalisis filsafat/ideologi Pancasila, maka jelas menunjukkan bahwa:

Seluruh bidang kehidupan (poleksosbudhankam atau politik-sosial, pendidikan-ekonomi, dan agama-seni) dan seluruh bidang ilmu (kerokhaniaan, budaya/humaniora, sosial, alam (sciences) dan teknologi, menurut Pancasila, haruslah dijiwai dan diarahkan oleh nilai-nilai moral/ahlak, baik yang bersumber dari perkembangan masyarakat maupun dari agama. Seperti kata Bertrand Russel:

"But man as a social animal is not only interested in finding but about the world: one of his tasks is to act within it. The scientific side is concerned with ends. It is mainly because of his social nature that man is faced with ethical problems. Science can tell him how certain ends might best be reached, what it cannot tell is that he should pursue one end rather than the other..."

Most of the principles which make for civilized living are this ethical character. (Wisdom of the West. 1964, p.407-408).

Agama Islam pun diturunkan untuk "memperbaiki ahlak manusia". Semua agama sarat dengan nilai-nilai moral. Demikian pula halnya dengan budaya etnis yang "Bhinneka Tunggal Ika" sarat pula dengan nilai-nilai luhur yang perlu direlevansikan dengan kehidupan modern dan tahap perkembangan masyarakat.

Hak-hak Asasi Manusia sebagaimana yang tersirat dan tersurat di dalam Pancasila/ UUD 1945/Bhinneka Tunggal Ika adalah "tujuan" (ends), bukan "cara/jalan" (means). Pancasila

menganut "tujuan menghalalkan cara" dan tidak sebaliknya "segala cara dapat ditempuh untuk menghalalkan tujuan".

Karena "bhinneka", maka tersusunlah Pancasila dan UUD 1945 untuk "menunggalkan bangsa": nilai dasarnya ialah "hanya dengan nilai-nilai moral, masyarakat manusia dan masyarakat bangsa yang beraneka ragam itu dapat dipersatukan dan diintegrasikan secara manusiawi.

Sebelum kita bertindak atau berbuat, kita wajib bertanya "demi apa?". Kalau tindakan dan perbuatan kita itu adalah demi tujuan luhur, maka kita pun pasti menemukan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka tujuan-tujuan tersebut seyogianya demi pembinaan dan pengembangan masyarakat, bangsa dan negara.

Pancasila sebagaimana dijabarkan di dalam GBHN, terutama GBHN 1993, menganut "pembangunan berkesinambungan" atau "sustainable development": bersikap dan berbuat etis/moral tidak hanya dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga terhadap manusia/warga negara/masyarakat dan lingkungan alam. Pembangunan yang terlalu dipaksakan terhadap masyarakat (yang berbeda-beda tahap perkembangannya) akan menimbulkan kejutan budaya (karena keberdayaan mereka belum cukup mencapai daya tahan yang tangguh), dan juga terhadap alam yang mengalami kerusakan.

Pembangunan itu sendiri pada hakekat dan kenyataannya adalah perubahan untuk

kemajuan: bagi sebagian besar masyarakat perubahan itu berarti modernisasi dari kehidupan mereka yang tradisional. Demi "kepentingan dan stabilitas nasional", imposisi dilakukan dan sektor ekonomi modern terus mendesak sektor ekonomi rakyat (tradisional). Demikian pula situasi dan kondisinya di sektor-sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Dengan demikian, Pancasila, baik yang dijabarkan di dalam wawasan Nusantara maupun di dalam GBHN 1993, jelas menganut pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan budaya. Dan wawasan tersebut adalah wawasan yang bermoral/berahlak/bernilai. Tidak ada yang bebas nilai (value free). Semua bidang ilmu, termasuk ilmu-ilmu alam dan teknologi, mengabdikan kepada perwujudan nilai-nilai luhur.

Sudut pandang dan sikap atau filosofi Pancasilais demikian yang juga berkembang dewasa ini dalam era pasca-modernisme (post-modernisme) yang membedakannya dari modernisme yang terlampau mengagungkan IPTEK dan materialisme.

Pancasila pun menganut "Bhinneka Tunggal Ika" (unity in diversity atau diversity in unity) yang tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga global/universal. Dan hidup berdamping secara damai akan dapat dicapai dengan upaya-upaya perwujudan nilai-nilai moral yang saling hormat menghormati keragaman dan perbedaan pendapat dalam suasana demokratis (termasuk sikap terbuka dan transparan berkenaan dengan cara dan tujuan).

Karena Pancasila sarat dengan nilai-nilai moral yang ingin diwujudkan secara sustainable, maka penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara wajiblah membina dan mengembangkan pelaksanaan hukum nasional secara sadar dalam mengabdikan pada tujuan dan kepentingan bersama/nasional yang jangka panjang dan luhur.

Karena itu pula, pemimpin-pemimpin masyarakat, bangsa dan negara adalah orang-orang yang tinggi keutuhannya, tinggi integritasnya (integritas kata dan perbuatan)

atau man of integrity/integrated personality yang di atas rata-rata, sehingga kata-kata dan perilakunya senantiasa memberdayakan masyarakat dan bangsa, selalu berpihak kepada yang belum berdaya... dan sadar akan strategisnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional.

Demikianlah Pancasila itu mengandung nilai-nilai moral/ahlak, kemanusiaan (humanisme, sustainability). Bhinneka Tunggal Ika/nasionalisme, musyawarah/demokrasi, hukum dan keadilan.

KONSISTENSI, KONTEKSTUALISASI DAN AKTUALISASI

Setelah pembangunan berlangsung selama lebih 25 tahun dan bahkan telah memasuki PJP II, masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh kelas menengah dan bahkan tokoh-tokoh elit), kian sadar dan kritis.

Kesadaran dan kontrol masyarakat itu menghendaki peningkatan konsistensi, kontekstualisasi dan aktualisasi (kemurnian dan kekonsekuenan) dalam proses perwujudan tujuan nasional berdasarkan Pancasila/UUD 1945, GBHN dan hukum.

Dalam analisa terakhir, moral/ahlak atau etika poleksosbud-hankam (politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan/ketertiban) sangat perlu ditingkatkan terus sesuai amanat GBHN 1993 dan sesuai tahap perkembangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas.

Dengan integritas (keutuhan) moral yang tinggi, maka kualitas pembangunan dalam konsistensi, kontekstualisasi dan aktualisasinya di segala bidang kehidupan akan meningkat pula secara sustainable atau berkesinambungan.

Dengan demikian, percepatan pembangunan (percepatan pemerataan, percepatan pertumbuhan dan peningkatan stabilitas nasional) seyogyanya lebih besar dikendalikan oleh pertimbangan-pertimbangan moral dan sustainability.

Penulis Prof. KMA M. Usop, M.A.